



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
10-14 APRIL 2021**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
10-14 APRIL 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 1. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 2. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 Januari 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 10 Maret 2021.
4. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI tanggal 31 Maret 2021 mengenai Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian,

lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk melihat dan mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama mengenai:

1. Kegiatan Cetak Sawah Baru dan Panen Padi Nutri Zinc, Desa Sendang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo;
2. Program dan Kegiatan di Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul dan dialog dengan Petani Coklat/Griya Coklat di Kabupaten Gunungkidul;
3. Permasalahan di Pabrik Minyak Kayu Putih Kesatuan Pemangkuan Hutan Yogyakarta di Sendang Mole Kabupaten Gunungkidul dan Dialog dengan Pengelola KPH Yogyakarta;
4. Gudang Bulog Baru (GBB) Purwomartani, Kalasan Kabupaten Sleman;
5. Permasalahan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Tanjung Adikerto, Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;
6. Program dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove di Desa Glagah dan Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo; dan
7. Menyerap Aspirasi para Pemangku Kepentingan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Meningkatkan Program-program Pemerintah terkait Bidang Kerja Komisi IV DPR RI pada Tahun Anggaran yang akan Datang.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh G. Budisatrio

Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 10-14 April 20201 dan bertempat di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.

B. GAMBARAN UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah setingkat provinsi yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah administrasi DIY mencapai 3.185,80 km², atau 0,17 persen dari seluruh wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara astronomis, wilayah DIY terletak pada posisi 7°.33'-80.12' Lintang Selatan dan 110°.00'-110°.50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya sisi selatan. Seluruh wilayah daratan DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, yakni Kabupaten Purworejo di sisi barat, Kabupaten Magelang dan Boyolali di sisi utara, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri di sisi timur. Wilayah selatan DIY berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Secara administratif, wilayah DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan DIY berada di Kota Yogyakarta. Berbeda dengan provinsi lain yang banyak mengalami pemekaran wilayah sejak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, jumlah kabupaten/kota di DIY tidak mengalami perubahan. Demikian pula dengan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan, dalam beberapa tahun terakhir juga tidak mengalami perubahan. Jumlah kecamatan pada tahun 2013 sebanyak 78 kecamatan yang terbagi menjadi 438 desa/kelurahan.

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2017 tumbuh 5,26%, tahun 2018 dan 2019 tumbuh sebesar 6,20% dan 6,59%. Namun ketika

pandemi melanda Indonesia tahun 2020 pertumbuhan ekonomi DIY turun menjadi -2,69%. Hal ini terjadi karena sektor pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi DIY terbesar sangat terdampak Covid-19 karena adanya pembatasan pergerakan orang untuk mencegah penyebaran Covid-19 di beberapa daerah. Namun di beberapa sektor lain seperti sektor jasa kesehatan dan pertanian menunjukkan tren yang positif.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Secara umum ketersediaan pangan di DIY cukup karena berkaitan dengan musim panen sehingga diperlukan pengaturan distribusi oleh Pemerintah. Ketahanan pangan selain ditentukan oleh sektor pertanian juga ditentukan sektor lainnya seperti perikanan dan kelautan serta kehutanan. Di sektor perikanan pemenuhan kebutuhan ikan di DIY dapat dipenuhi dari perikanan tangkap maupun budi daya. Untuk perikanan tangkap dilakukan melalui pengembangan pelabuhan perikanan Sadeng dan Glagah.

Selain pertanian, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hutan yang cukup luas dan didominasi oleh hutan produksi, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Luas kawasan hutan di DIY keseluruhan sebesar 18.499,85 ha dengan luas hutan produksi sebesar 13.519,47 ha. Pengelolaan Hutan Produksi di DIY dilakukan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) DIY di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY.

IV. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KUNJUNGAN DI KABUPATEN KULON PROGO

1. Lokasi Cetak Sawah baru dan Panen Padi Nutri Zinc, Desa Sendang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Lokasi percetakan sawah baru dan panen padi Nutri Zinc di Desa Sendang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo merupakan lokasi kunjungan pertama yang dikunjungi oleh Tim Komisi IV DPR RI. Acara panen perdana padi Nutri Zinc dilakukan oleh Ketua Tim, Bapak G Budisatrio Djiwandono yang didampingi oleh anggota tim, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bupati Kulon Progo, Perwakilan PT PIHC, dan Perum Bulog.

Dalam sambutannya Bupati Kulon Progo menyampaikan bahwa sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomiannya, yaitu sebesar 14,56 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduknya masih berminat sebagai petani. Di saat ekonomi sedang mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid-19, sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo tetap tumbuh positif sebesar 0,6 persen.

Menurut Bupati Kulon Progo, kabupatennya merupakan lumbung padi/beras untuk DIY, pada tahun 2020 kabupatennya memiliki kelebihan surplus beras sebesar 41 ribu ton. Oleh sebab itu, bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat bekerja sama dengan e-warung yang menyediakan produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petaninya. Sedangkan bantuan beras miskin yang bekerja sama dengan Bulog, maka pengadaannya Bulog membeli beras yang dihasilkan oleh petani. Dalam menggerakkan ekonomi masyarakatnya maka dikembangkan Moto Bela Kulon Progo Beli Kulon Progo.

Padi Inpari Nutri Zinc merupakan jenis padi varietas unggul yang memiliki kandungan zinc lebih tinggi dibandingkan dengan padi jenis lainnya. Oleh sebab itu, pengembangan padi ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan sekaligus mengatasi penyakit kekerdilan pada masyarakat yang kurang mengonsumsi zinc yang merupakan unsur mikro yang dibutuhkan dalam makanan untuk mengatasi stunting yang berada pada masyarakat yang bergizi buruk.

Menurut Dr. Suwandi - Dirjen Tanaman Pangan, padi jenis ini pada tahun 2020 telah ditanam seluas 10 ribu hektar di berbagai daerah terutama pada daerah yang diidentifikasi penduduknya banyak yang menderita stunting. Pada tahun 2021 pengembangan padi ini diteruskan dengan memperluas areal penanamannya, yaitu sebanyak 50 ribu hektar dan merupakan program bantuan dari Pemerintah. Beras Nutri Zinc menurut Bupati Kulon Progo harganya lebih tinggi dibandingkan dengan beras biasa, yaitu Rp15.000,00/kg nya. Oleh sebab itu, banyak petani yang berminat untuk menanam dan mengembangkan padi jenis tersebut.

Di Kabupaten Kulon Progo juga dikembangkan lahan untuk komoditas pangan dan hortikultura seperti sayuran dan palawija pada lahan-lahan marginal seperti lahan berpasir di pantai selatan. Sekarang telah dikembangkan tidak kurang dari 2000 hektar petani menanam pada lahan tersebut dan dengan menambahkan kompos dan pupuk kandang, lahan tersebut menjadi lahan yang sangat subur untuk menanam komoditas sayuran dan cabe. Kulon Progo juga memiliki potensi peternakan yang sangat baik. Daerah ini menurut Dr. Suwandi terdapat jenis kambing unggul, yaitu Peranakan Etawa (PE) yang dikembangkan oleh petani di Desa Sami Galuh. Jenis kambing ini selain menghasilkan protein dalam bentuk daging, juga menghasilkan susu yang sangat bagus sebagai sumber protein hewani. Oleh sebab itu, ke depan dalam mengembangkan potensi penanaman padi Nutri Zinc, penanaman sayuran dan palawija serta pengembangan ternak petani tidak harus selalu menunggu bantuan dari Pemerintah, akan tetapi dapat memanfaatkan jasa perbankan melalui kredit program KUR yang memiliki bunga yang sangat rendah dan pada tahun ini Pemerintah mengalokasikan tidak kurang dari Rp70 triliun untuk KUR.

Sementara itu, dalam sambutannya G. Budisatrio Djiwandono yang merupakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, mengapresiasi program penanaman padi Inpari Nutri Zinc dan pencetakan sawah baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam membangun ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi dan gizi masyarakat, terutama dalam meningkatkan imunitasnya menghadapi penyakit seperti Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Pada kesempatan tersebut disampaikan bantuan berupa bibit padi dan alat mesin pertanian. Kelompok tani yang mendapat bantuan, antara lain Kelompok Tani Sejahtera, Kelompok Tani Sidodadi, KUB Tani Manunggal, dan Kelompok Tani Sarimanggarnata, dan lain-lain.

2. Lokasi Program dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Pantai Congot dan Pantai Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke lokasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Pantai Selatan Bandara Yogyakarta International

Airport. Kegiatan penanaman kembali ini merupakan mitigasi “*green belt*” agar terhindar dari abrasi, salinitas garam yang tinggi, pemecah angin, dan mengatasi ombak tinggi. Lahan yang direhabilitasi seluas 50 hektar meliputi 4 desa, yaitu Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Palihan, dan Desa Glagah. Pelaksana rehabilitasi adalah kelompok masyarakat yang berada di sekitar areal bandara.

Jenis-jenis tumbuhan yang disediakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Serayu Opak Progo (SOP), terdiri dari Cemara Udang 33.000 batang, Ketapang, 4.400 batang, Keben 2.200 batang, Nyamplung 4.400 batang, dan Pandan 100.000 batang. BPDASHL SOP menganggarkan kegiatan RHL sejak tahun 2019 s.d. 2021 yang mana telah menyerap tenaga kerja sebanyak 5.917 HOK (hari orang kerja). Oleh karenanya RHL adalah salah satu bentuk insentif kegiatan kepada warga masyarakat karena jumlah HOK yang cukup besar. Manfaat lain yang akan dirasakan oleh warga apabila pohon-pohon yang ditanam tumbuh besar akan menjadi objek wisata dan menarik banyak pelancong dari kota-kota sekitar.

Tantangan terbesar dari kegiatan RHL di Pantai Selatan Bandara YIA adalah menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif warga untuk terlibat karena lokasi-lokasi RHL sebelumnya adalah sumber mata pencaharian warga berupa tambak-tambak ikan.



Gambar 1. Kondisi Awal Sebelum RHL

Proses sosialisasi dan komunikasi kepada warga yang intensif membuahkan hasil, karena akhirnya warga sendiri yang aktif berperan serta dalam kegiatan dan mengajak warga-warga lainnya yang semula menolak program ini.



Gambar 2. Pelaksanaan RHL

Pelaksanaan RHL di lokasi yang kondisi alamnya cukup ekstrim karena suhu udara yang panas, kandungan garam di udara, banyak angin laut, serta penanaman di atas pasir yang tidak banyak unsur haranya, Balai PDASHL melakukan beberapa intervensi untuk meningkatkan persentase keberhasilan dengan menggunakan *compost block*, srumbung, dan sumur bor. Manfaat *compost block* untuk menambah unsur hara, memperbanyak biomassa tanah, menambah bahan organik, serta mempertahankan kelembaban dan nutrisi tanah. Berikutnya fungsi srumbung yang terbuat dari bambu yang dianyam adalah untuk pengamanan tanaman dari binatang, mengurangi kecepatan angin dan melindungi tanaman dari kandungan garam yang terbawa angin. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau digunakan sumur bor yang memanfaatkan air tanah.





Gambar 3. Perkembangan Tanaman

Pada kesempatan ini, warga yang melaksanakan kegiatan RHL menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada BPDASHL SOP yang sudah melakukan kegiatan RHL dan memohon agar kegiatan ini dapat dilanjutkan dan berkesinambungan. Memperhatikan permohonan warga, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa kegiatan RHL sudah berlangsung 3 (tiga) tahun dan untuk melanjutkannya perlu pendanaan dari sektor lain, seperti swasta. Oleh karena itu, Dirjen PDASRH akan membantu warga untuk mengajukan proposal untuk program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang beroperasi di Bandara YIA atau DIY secara umum. Komisi IV DPR RI yang diwakili oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada warga dan BPDASHL SOP yang sudah melaksanakan program RHL di Pantai Selatan Bandara YIA dan meminta program ini dapat dilakukan secara berkesinambungan di lokasi tersebut dan lokasi-lokasi lahan kritis lainnya.

3. Lokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove di Blok Pasir Kadilangu, Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian dan menyebabkan masyarakat kecil ikut terkena dampaknya. Oleh karena itu, Pemerintah

melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan program kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM). Program PKPM di wilayah BPDASHL SOP adalah 111,1 ha yang tersebar di DIY dan Jawa Tengah.

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Lokasi					Luas (Ha)
			Dusun / Blok	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KTH Cemara	45	Pejanten dan Aglik 1	Lembupurwo	Mirit	Kebumen	Jawa Tengah	20,00
2	Pokmaswas Ngudidoyo	13	Aglik dan Widodo	Wiromartan	Mirit	Kebumen	Jawa Tengah	3,50
3	KT Mbangun Karyo	36	Ubil	Tegalretno	Petanahan	Kebumen	Jawa Tengah	5,10
4	KTH Pansela	65	Sigong	Ayah dan Candirenggo	Ayah	Kebumen	Jawa Tengah	15,00
5	KT Bina Usaha	45	Wero	Wero	Ngombol	Punworejo	Jawa Tengah	18,00
6	KTH Lestari	32	Ngrupek	Malang	Ngombol	Punworejo	Jawa Tengah	15,00
7	KTH Sido Makmur	42	Kali Lereng	Pagak	Ngombol	Punworejo	Jawa Tengah	15,00
8	Keluarga Pemuda Pemudi Baros	83	Tegalrejo, Baros, Depok	Tirtohargo	Kretek	Bantul	D.I. Yogyakarta	8,50
9	KTH Wana Tirta	41	Pasir Mendit	Jangkar	Temon	Kulon Progo	D.I. Yogyakarta	7,50
10	KTH Pasir Kadilangu	33	Pasir Kadilangu	Jangkar	Temon	Kulon Progo	D.I. Yogyakarta	3,50
		435						111,10

Tabel 1. Daftar KTH peserta Program PEN di BPDASHL SOP

PEN Padat Karya Mangrove di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan di 2 Dusun yaitu Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu yang berada di Desa Jangkar. Jumlah yang terlibat 2 kelompok pelaksana yaitu KTH Wana Tirta dan KTH Pasir Kadilangu. Penanaman dilakukan dengan pola intensif, yaitu 10.000 batang per hektar. Luasan lahan yang ditanami dengan Rhizopora di kedua dusun tersebut 11 ha, sehingga jumlah bibit yang ditanami sebanyak 110.000 ha, melibatkan 74 tenaga kerja dan jumlah hari orang kerja sebanyak 4.440 HOK.

Pelaksanaan PEN Mangrove di Desa Jangkar dimulai dengan pembuatan sarana dan prasarana pendukung seperti pondok kerja dan papan nama kegiatan serta pemasangan pelindungan tanaman berupa pagar. Kegiatan penanaman Rhizopora yang melibatkan warga serta pemeliharaan dengan penyulaman.

Ketua KTH Pasir Kadilangu menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu warga dan berharap kegiatan-kegiatan serupa bisa terus dilakukan.

4. Lokasi Pelabuhan Tanjung Adikerto Kabupaten Kulon Progo

Potensi perikanan di WPP 573 membuka peluang usaha kegiatan perikanan melalui Pelabuhan Perikanan (PP) Tanjung Adikerto. Peluang usaha tersebut akan meningkatkan ekspor produk perikanan secara nasional, memenuhi konsumsi lokal kebutuhan ikan nasional serta pertumbuhan ekonomi DIY pada khususnya.

Luas lahan PP Tanjung Adikerto semula 75 hektar, namun kondisi saat ini tinggal 16,5 hektar (lahan darat, kolam, dan alur pelayaran) karena sebagian besar lahan telah disewakan yang mengakibatkan kondisi tersebut kurang ideal untuk menjadi pusat industri perikanan. Oleh karena itu, luas lahan harus dikembalikan seperti semula, yaitu 75 ha agar menarik para investor dalam melakukan kegiatan industri perikanan.

Permasalahan utama di PP Tanjung Adikerto adalah sedimentasi di muara Sungai Serang. Menurut Plt. Dirjen Perikanan Tangkap sudah ada pemasangan *breakwater* di sisi timur dan barat muara sungai, namun kondisi saat ini di sekitar *breakwater* terjadi timbunan atau sedimentasi. Beberapa skenario maksimal dan minimal untuk membuka muara PP Tanjung Adikerto, namun menurut salah satu ahli dari UGM yang paling efektif adalah dengan membeli alat/kapal keruk pasir yang beroperasi di PP Tanjung Adikerto.



Gambar 4. Gambar Jalur Pelayaran



Gambar 5. Gambar Penyempitan Jalur Pelayaran

Selain melakukan pembersihan alur pelayaran/muara sungai dari pasir, menurut Plt. Dirjen Perikanan Tangkap para pihak terkait, yaitu Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu berbicara dan berdiskusi untuk mengatur kewenangan dan porsi kegiatan untuk pengembangan PP Tanjung Adikerto. PP Tanjung Adikerto adalah milik Pemerintah Provinsi DIY, sedangkan untuk pengelolaan pelabuhan perlu intervensi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan pelabuhan. Sebagai tambahan dana APBN yang sudah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di PP Tanjung Adikerto mencapai Rp420 miliar yang disalurkan sejak tahun 2004.

Jika sudah ada kesepakatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pengelola akan membuka peluang investor swasta untuk masuk dan berinvestasi di PP Tanjung Adikerto karena potensi perikanan yang sangat besar serta lokasi pelabuhan yang sangat dekat dengan Bandara YIA, sehingga produk-produk dari PP Tanjung Adikerto langsung dapat diekspor melalui Bandara YIA. Potensi perikanan di Samudera Hindia tahun 2019 menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

STATUS STOK TUNA DI SAMUDERA HINDIA TAHUN 2019:

	ALBACORE (<i>Thunnus alalunga</i>)	BIG EYE TUNA (<i>Thunnus obesus</i>)	SKIPJACK TUNA (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	YELLOWFIN TUNA (<i>Thunnus alalunga</i>)
Jumlah tangkapan keseluruhan di Samudera Hindia Tahun 2019	39,876 ton	73,165 ton	547,248 ton	427,240 ton
Rata-rata tangkapan 2015-2019	38,365 ton	88,303 ton	506,555 ton	424,103 ton
Hasil tangkapan di Indonesia tahun 2019	5,604 ton	20,404 ton	85,277 ton	40,306 ton
Hasil kajian stok 2019	Stock Albacore Not Overfished But Is Subject to Overfishing	Stock Big Eye Tuna Not Overfished But Is Subject to Overfishing	Stock Skipjack Tuna Not Overfished But Is Subject to Overfishing	Stock Yellowfin Tuna Overfished And Subject To Overfishing
Alat tangkap utama	Drifting longline (deep-freezing longline dan fresh-tuna longline)	Longline dan purse seine		
Proporsi tangkapan Indonesia	13.57% dari total tangkapan ALB di IOTC Competence Area	21.82% dari total tangkapan BET di IOTC Competence Area	14.03% dari total tangkapan SKJ di IOTC Competence Area	9.52% dari total tangkapan YFT di IOTC Competence Area

Sumber: Loka Riset Perikanan Tuna 2020

Catch Limit dan Pemanfaatan Tuna Madidihang oleh Kapal Ikan Indonesia di Samudera Hindia :

Pembatasan Catch Limit Madidihang di Samudera Hindia		
Fleet	Catch Limit	Tangkapan 2019
Purse Seine	12.395	16.388
Long Line	11.381	4.260
Gillnet	1.990	1.848
Line	12.792	11.731
Other	6.492	5.751

Kesimpulan: Dari 106 unit Rawai Tuna yang mungkin dioperasikan sebagaimana Slide 18, Hanya 29 Unit Armada yang dapat diizinkan beroperasi menangkap tuna di wilayah IOTC, 77 unit lainnya menangkap pelagis besar non tuna (swordfish, billfish, tenggiri, Lemadang dll.)

Activate Wi
Go to Settings!

Tabel 2. Status Stok Tuna di Samudera Hindia Tahun 2019

POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN ARMADA DI WPP-NRI 573

Sumberdaya	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi	Total
Polensi	630.521	586.128	7.902	22.045	7.340	970	526	3.913	8.195	1.267.540
JTB	504.417	468.902	6.322	17.636	5.872	776	421	3.130	6.556	1.014.032
Produksi 2019*)	226.718	100.071	73.089	34.069	7.070	853.473	789	2.575	9.543	454.778
Tingkat pemanfaatan sesuai KepmenKP 50/2017	1,50	1,06	0,39	1,09	1,70	0,61	0,28	0,98	1,10	
Tingkat pemanfaatan 2019*										
Sisa JTB (Total Pusat + Daerah)	277.699	368.831	-	-	-	-	-	555	-	
Total Kapal Eksisting:	Kapal <30 GT = 109.246 unit kapal ; Kapal >30 GT = 635 unit kapal, terdiri dari: PSPB=471 unit, Rawai Tuna= 97 unit, Pancing Ulur Tuna= 4 unit, Bagan Berperahu= 2 unit, PSPK=46 unit									

Peluang Pengembangan Armada Izin Pusat:

Kelompok Jenis Pelagis Besar (termasuk tuna):

Alokasi Per API	Peluang Pemanfaatan Izin Pusat (ton)	Komposisi API yang menangkap PB	Peluang (Ton)	Produktifitas	Peluang (GT)		Peluang (Unit)	
					25%	50%	25%	50%
PSPB	318.220	30%	95.466	1,72	13.876	27.752	69	138
Rawai Tuna		25%	79.555	0,94	21.158	42.317	106	212
Pancing Ulur Tuna		35%	111.377	0,86	32.377	64.754	162	324
Bagan Berperahu		5%	15.911	0,86	4.625	9.251	23	46
Jaring Insang Hanyut		5%	15.911	0,78	5.100	10.199	25	50

Catatan: PSPB hanya dapat menangkap Ikan Pelagis Non Tuna

Kelompok Jenis Pelagis Kecil:

Alokasi Per API	Peluang Pemanfaatan Izin Pusat (ton)	Komposisi API yang	Peluang (Ton)	Produktifitas	Peluang (GT)		Peluang (Unit)	
					25%	50%	25%	50%
PSPK	149.318	100%	149.318,11	1,35	27.652	55.303	138	276

Total Pengembangan Armada: 1046 unit kapal izin pusat (rata-rata 200 GT)

No.	Kelompok Jenis Ikan	Peluang Pemanfaatan Izin Pusat (Ton)
1	Pelagis Besar Termasuk Tuna dan Cakalang	318.220
2	Pelagis Kecil	149.318
	Total (Ton)	467,538

Catatan :

- Peluang dibagi menjadi pusat dan daerah berdasarkan Catch History (Komposisi Hasil Tangkapan Pusat-Daerah)
- Ukuran kapal rerata sebesar 200GT
- P10% adalah pemanfaatan sebesar 10% dari peluang yang tersedia
- P25% adalah pemanfaatan sebesar 25% dari peluang yang tersedia

Tabel 3. Potensi dan Peluang Pengembangan Armada di WPP-NRI 573

Komisi IV DPR RI pada kesempatan kunjungan kerja menyampaikan dukungannya untuk revitalisasi PP Tanjung Adikerto agar dapat dimanfaatkan oleh nelayan dari Kulon Progo s.d. Purworejo, bahkan Kebumen. Selain itu, faktor besarnya investasi negara dalam bentuk bangunan sarana dan prasarana harus bisa dimanfaatkan secepatnya. Komisi IV DPR RI juga mendorong semua stakeholder terkait PP Tanjung Adikerto sama-sama mengambil keputusan dalam pembagian kewenangan pengelolaan pelabuhan.

B. KUNJUNGAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul dan Dialog dengan Petani Coklat/Griya Coklat di Kabupaten Gunungkidul

Obyek kunjungan adalah Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran dan sekaligus menghadirkan petani kakao dan pengrajin produk kakao dari Griya Coklat di Dusun Nglanggeran. Pada kesempatan ini Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan terkait peran dan fungsi TPP Nglanggeran serta proses pembuatan coklat yang dilakukan oleh para pengrajin dan petani kakao setempat.

TPP Nglanggeran merupakan salah satu *science park* yang berfungsi untuk pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, serta pengolahan hasil dan pascapanen yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, dan perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan penerapan dan alih teknologi hasil Litbang Kementerian/LPNK Ristek, swasta, dan perguruan tinggi kepada masyarakat.
- b. Membangun model percontohan pertanian terpadu yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu siklus hulu-hilir secara berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan mandiri di bidang agroteknologi dan agribisnis.

Menurut Kepala BPTP Yogyakarta, prinsip pembangunan TPP adalah berdasarkan pada prinsip: (1) pendekatan kawasan, (2) integrasi antara *on farm* dan *off farm*, (3) padat teknologi dan modal, (4) multi komoditas,

(5) pemasaran, (6) membangun masyarakat, dan (7) menggunakan prinsip LEISA.

Pada kesempatan dialog dengan petani pengrajin kakao disampaikan permasalahan yang dihadapi petani dalam mengembangkan produk hilirnya, yaitu:

- a. Ketersediaan pasokan bahan baku yang memiliki kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan produk hilir yang dikembangkan;
- b. Kapasitas alat pengolah kakao seperti mesin pembuat tepung kakao dan pembuat pasta kakao.

Selain itu, diperoleh informasi antara lain:

- a. Petani a.n. Edi Suparjono yang mewakili kelompok Tani Sidodadi, Kabupaten Gunungkidul, merupakan petani dengan komoditas utama yang dibudidayakan adalah kakao, menyampaikan keluhannya terkait kendala dalam pengolahan coklat untuk memperoleh nilai tambah bagi petaninya. Salah satu kendala adalah belum dimilikinya alat pres untuk memisahkan minyak coklat dengan coklatnya. Alat yang dimiliki kapasitasnya hanya 0,7 kg dalam sekali melakukan pengepresan. Alat lain yang dibutuhkan adalah alat untuk membuat coklat bubuk.
- b. Paryanto merupakan pelaku industri coklat yang berbasis kakao yang dihasilkan oleh petani di DIY, yaitu di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman. Menurutnya, pada umumnya produktivitas tanaman coklat di wilayahnya relatif rendah sehingga kurang menguntungkan dan menarik bagi petani untuk mengembangkannya. Rendahnya produktivitas tersebut karena pada umumnya tanaman kakao yang sudah tua dan jumlah tegakan dalam satu hektarnya tidak sesuai dengan standar budi daya yang baik. Oleh sebab itu, Paryanto meminta agar Pemerintah membantu petani meremajakan tanamannya. Selain itu, juga meminta untuk pengembangan dan kesinambungan pengembangan kakao di daerahnya, maka di Yogyakarta agar dibangun kebun entres kakao untuk kebutuhan lokal atau setempat.

Tanggapan Komisi IV DPR RI terhadap permasalahan yang disampaikan oleh para petani tersebut sebagai berikut:

- a. Petani agar menyampaikan usulan kebutuhannya secara resmi kepada Pemerintah melalui Dinas yang membidangi perkebunan di daerahnya. Selanjutnya meminta agar Direktur Jenderal Perkebunan dapat mengupayakan dan membantu pada tahun anggaran selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan permintaan untuk melakukan peremajaan kakao rakyat yang sudah tua dan pembangunan kebun entres kakao sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, Komisi IV DPR RI meminta agar Direktorat Jenderal Perkebunan mengusahakannya pada tahun anggaran yang akan datang.
- b. Dalam melakukan perbaikan dan pembangunan pertanian, baik di hilir maupun di hulunya, Komisi IV DPR RI juga meminta kepada petani dan masyarakat tidak terlalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah, akan tetapi bisa memanfaatkan kredit program seperti KUR yang tersedia cukup banyak dan dengan bunga yang sangat rendah. Komisi IV DPR RI juga meminta agar Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2021 mengalokasikan kegiatan peremajaan dan rehabilitasi kakao rakyat seluas 200 hektar.

2. Pabrik Minyak Kayu Putih Kesatuan Pemangkuan Hutan Yogyakarta di Sendang Mole Gunung Kidul dan Dialog dengan Pengelola KPH Yogyakarta

Pada awal berdirinya sebelum terbentuknya Balai KPH Yogyakarta, pabrik minyak kayu putih Sendang Mole merupakan salah satu unit pengolahan minyak kayu putih di bawah Balai Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2007 terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.439/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 16.358,60 ha di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Selanjutnya Pemerintah Provinsi DIY melalui Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta Lembaga Teknis Daerah DIY, yang di dalamnya termaktub organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Oleh karena itu, Balai KPH

Yogyakarta resmi beroperasi sejak tahun 2009, dengan mengelola kawasan hutan seluas 16.358,60 ha dan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.

Berdasarkan Perda Nomor 36 Tahun 2008 di atas, selanjutnya pabrik minyak kayu putih Sendang Mole pengelolaannya berada di bawah Balai KPH Yogyakarta. Pabrik ini menurut wilayah administratif pemerintahan terletak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, sedangkan menurut pembagian wilayah pengelolaan hutan KPH Yogyakarta terletak di RPH Tahura Bunder, BDH Playen. Luas pabrik minyak kayu putih Sendang Mole $\pm 446 \text{ m}^2$ dengan mesin pengolahan dan peralatan yang sudah modern.

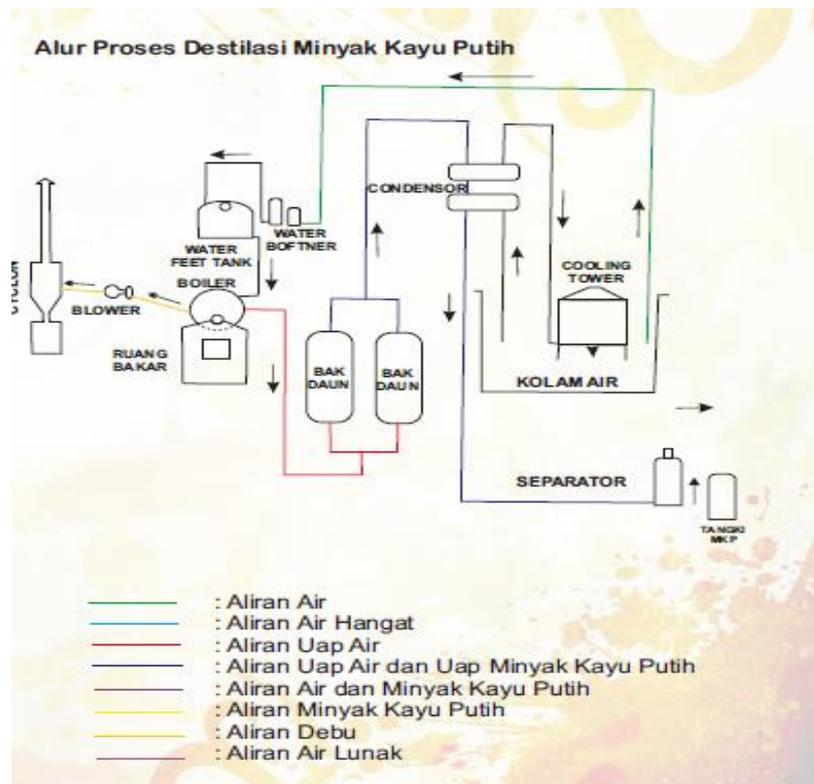
Sumber bahan baku penyulingan minyak kayu putih di Pabrik minyak kayu putih Sendang Mole adalah daun kayu putih yang dipungut dari tegakan kayu putih di kawasan hutan Balai KPH Yogyakarta, yaitu di wilayah BDH Playen, BDH Paliyan, dan BDH Panggang dengan luas areal $\pm 2.049,67 \text{ m}^2$. Sistem pemungutan daun adalah dengan sistem rimbas, yaitu pemangkasan tanaman kayu putih yang berumur lima tahun atau lebih dengan ketinggian satu meter. Sistem rimbas dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pemetikan sistem urut, yaitu pemetikan dengan alat khusus (arit) untuk daun-daun yang sudah cukup umur. Pada sistem urut, pemetik harus memilih satu per satu daun-daun yang sudah cukup umur. Selain itu, sistem rimbas dinilai dapat mengimbangi kebutuhan pabrik akan kebutuhan daun kayu putih yang cukup besar. Kebutuhan daun untuk pabrik sekitar 18.000 kg/hari (18 ton daun/hari) dengan kemampuan rata-rata setiap pemetik daun sekitar 150 kg/hari. Setelah pemetikan/pemangkasan, daun kemudian ditimbang dan diangkut ke areal pabrik, dan disimpan di lantai yang kering dengan kondisi suhu kamar dan sirkulasi udara yang terbatas untuk mencegah proses hidrolisis. Waktu penyimpanan dibatasi paling lama satu minggu untuk mencegah pendamaran komponen-komponen dalam daun.

Proses produksi penyulingan minyak kayu putih adalah sebagai berikut:

- a. Pengisian bak air (di luar) dari sumber air sampai penuh.
- b. Penyiapan alat-alat yang menggunakan energi listrik, seperti pompa *condensor*, *cooling tower*, *automatic box* untuk pompa *boiler*, *pompa water softner* dan *blower* agar dapat berfungsi dengan baik.

- c. Memasukkan air dari bak air ke dalam *water softner* dan setelah dilunakkan kemudian dimasukkan ke dalam *feed tank*.
- d. Memasukkan air dari *feed tank* ke dalam *boiler*.
- e. Memasukkan keranjang daun ke dalam bak daun dengan menggunakan *hoist crane*.
- f. Menimbang daun kemudian memasukkan daun ke dalam bak daun dengan kapasitas tiap bak ± 2 ton daun berikut ranting-ranting kecil agar ada rongga udara (tutup bak daun belum ditutup).
- g. Setelah air dalam *boiler* cukup, kemudian memasukkan briket daun ke dalam ruang bakar dan menyalakan briket untuk memanaskan air dalam *boiler*. Selama proses pemasakan berlangsung, tekanan uap air dalam *boiler* harus selalu dijaga agar tidak melebihi 5 atmosfer (dilihat pada manometer), *blower* akan mati secara otomatis. Apabila tekanan uap turun 2,5 atmosfer *blower* akan secara otomatis hidup kembali dan akan menghasilkan tekanan uap lebih tinggi lagi.
- h. Uap panas dialirkan ke dalam bak daun agar udara yang masih ada dalam bak daun terbuang, baru kemudian bak daun ditutup dengan rapat. Uap panas ini mempunyai tekanan yang kuat sehingga dapat mengeluarkan minyak kayu putih dari daun kayu putih berupa uap minyak dan air.
- i. Mengalirkan uap minyak panas yang tercampur dengan uap air ke dalam kondensor dengan tujuan untuk mendinginkan uap minyak tersebut. Air yang digunakan pada proses pendingin ini berasal dari *cooling tower* yang selalu diperiksa agar air tetap dingin, dan air di dalam bak selalu dalam keadaan penuh.
- j. Setelah uap yang berisi minyak kayu putih dan air didinginkan, kemudian dialirkan ke dalam separator untuk memisahkan minyak kayu putih dengan air. Karena berat jenis air lebih besar dari pada berat jenis minyak kayu putih, maka minyak kayu putih berada di atas dan air berada di bawah.
- k. Membuka keran yang ada pada separator untuk mengalirkan air dan membuangnya melalui saluran tersendiri, sehingga di dalam separator hanya tersisa minyak kayu putih saja.

- l. Mengalirkan minyak kayu putih dan menampungnya ke dalam tangki minyak. Dari tangki minyak, minyak kayu putih kemudian dimasukkan ke dalam jerigen dan diendapkan selama ± 24 jam untuk menghilangkan/memisahkan kotoran maupun air yang mungkin masih tersisa. Akhirnya diperoleh minyak kayu putih yang bersih dan murni.
- m. Setelah proses pemasakan selesai $\pm 6-8$ jam, bak daun kemudian dibuka dan daun bekas pemasakan kemudian dikeluarkan bersama keranjang daun dengan menggunakan *hoist crane*.
- n. Daun bekas pemasakan tersebut kemudian dibawa ke tempat penjemuran dengan menggunakan *hoist crane*, dikeluarkan dari keranjang untuk dijemur dan dicetak sebagai bahan bakar briket.



Gambar 6. Gambar Siklus Produksi Minyak Kayu Putih

Spesifikasi Teknis:

- a. Kapasitas Produksi
 - Jumlah bak daun/ketel: 3 unit.
 - Kapasitas: 2 ton daun/bak daun.
 - Lama siklus penyulingan: 6–8 jam (3 kali masak/24 jam).
 - Kapasitas optimal: 18 ton daun/24 jam.
- b. Bahan Bakar: limbah daun kayu putih proses penyulingan sebelumnya (dibuat briket).

- c. Sistem Penyulingan : destilasi uap.
- d. Rendemen : 0,8%-1%.
- e. Hasil produksi rata-rata : 8–10 liter minyak kayu putih/ton daun.
- f. Hasil produksi optimal : ±165 liter minyak kayu putih/hari.

Minyak kayu putih hasil penyulingan dari pabrik minyak kayu putih Sendang Mole oleh Balai KPH Yogyakarta kemudian dijual melalui mekanisme lelang tertutup. Lelang ini dilaksanakan sebelum produksi minyak dilakukan, dimana sebelumnya diumumkan di media massa dan internet tentang rencana pengadaan lelang minyak kayu putih. Pihak-pihak yang akan mengikuti lelang kemudian mendaftarkan diri berikut persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Data calon peserta lelang kemudian diverifikasi dan apabila memenuhi persyaratan maka berhak mengikuti lelang.

Pemenang lelang ditentukan dari jumlah penawaran tertinggi. Setelah lelang dilaksanakan, maka kewajiban dari pemenang lelang adalah membeli semua hasil produksi minyak kayu putih pada tahun tersebut sesuai dengan harga pemenang lelang. Uang hasil penjualan tersebut kemudian disetorkan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA DIY) sebagai Pendapatan.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPH Yogyakarta mengelola kawasan hutan di Kabupaten Gunungkidul, karena memberikan manfaat ekonomi untuk daerah dan masyarakat yang menjadi mitra serta mampu menjaga kelestarian hutan.

Pengelola KPH Yogyakarta dalam hal ini Kepala KPH menyampaikan juga selain Pabrik minyak kayu putih Sendang Mole, KPH Yogyakarta juga memiliki usaha lain yaitu pemanfaatan hasil hutan nonkayu yaitu murbei, ulat sutera, madu hutan, dan tumpangsari. Usaha lain adalah pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam di Mangunan, Kalibiru, Watu Payung, Klayar, Goa Ngingrong dengan sistem kerja sama antara KPH dan masyarakat. Selain itu, KPH Yogyakarta juga membina KTH pemegang izin Hutan Kemasyarakatan (HKM), yaitu HKM Mandiri Kalibiru dan HKM Watu Payung.

Kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Kepala KPH Yogyakarta dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menyampaikan aspirasi perihal kondisi KPH pasca Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur bahwa seluruh KPH menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kehutan dan mencabut kewenangan kerja sama KPH dengan pihak lain seperti kelompok tani hutan dan swasta dan menggantikannya dengan perizinan berusaha (pihak ketiga). Akibatnya KPH Yogyakarta dan seluruh KPH-KPH lain di Indonesia, khususnya yang sudah memiliki aset seperti pabrik, toko, dan lain-lain untuk menunjang usahanya akan terdampak. Sedangkan dahulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Kementerian Kehutanan) mendorong kemandirian KPH salah satunya dengan memiliki usaha pemanfaatan kayu atau nonkayu. Berikut hasil usaha KPH Yogyakarta selama 2020:



Gambar 7. Pendapatan KPH selama Pandemi (2020)

Berdasarkan pembentukan KPH, KPH adalah amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Kemudian Pemerintah Pusat meluncurkan kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sehingga kebijakan Pemerintah dalam bentuk PP dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah. Namun dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2021, mengakibatkan KPH salah satunya KPH Yogyakarta kehilangan landasan hukum dalam menjalankan usaha dan kerja sama dan harus segera mereposisi strategi pengelolaan hutan, namun di satu sisi KPH Yogyakarta pada tahun 2021 dibebani kewajiban PAD yang mana saat ini sangat diperlukan daerah untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19.

C. KUNJUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN

Gudang Bulog Baru (GBB) Purwomartani – Kalasan Kabupaten Sleman

Pada kunjungan ke Gudang Bulog Baru (GBB) di Purwomartani Kalasan, Kabupaten Sleman, Komisi IV DPR RI diterima oleh Direktur Keuangan Bulog Bagya Mulyanto. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa GBB Purwomartani pada tahun 2021 memiliki target pengadaan CBP untuk DIY sebesar 78.000 ton dan sudah terealisasi stok sebanyak 38.000 ribu ton, dengan kondisi panen seperti sekarang ini, Bulog optimis bahwa sisa pengadaan dapat diperoleh daerah setempat.

Menurut Direktur Keuangan Bulog, kinerja perum Bulog Kanwil Yogyakarta pada tahun 2020 dalam pengadaan beras mencapai 98 persen (51.676 ton) dari target sebesar 53.000 ton, penyaluran beras medium mencapai 80 persen (32.282 ton) dan penyaluran Bansos sebesar 100 persen (33.852 ton). Sedangkan ketersediaan stok adalah: (1) Beras sebesar 38.226 ton, (2) Gula 486 ton, (3) Minyak 2.322 liter, (4) Daging kerbau 16 ton, (5) Tepung 14 ton, dan (6) Daging sapi 3 ton.

Pada sambutan Komisi IV DPR RI yang diwakili oleh Bapak Panggah Susanto disampaikan perihal gambaran kebijakan Bulog dalam perspektif Komisi IV DPR RI bahwa dalam membangun Ketahanan Pangan Nasional terdapat 3 kelembagaan, yaitu Bulog, Industri Pupuk yang menjamin ketersediaan pupuk dalam melakukan produksi dan kelembagaan perbenihan yang menyediakan benih untuk kebutuhan menanam.

Dalam kondisi ini peran Bulog tidak boleh hilang, artinya Bulog dengan investasinya yang sangat besar eksistensinya tidak boleh hilang terutama dalam mengendalikan stok dan harga komoditas strategis seperti beras, gula dan minyak goreng. Bulog menjadi alat kepanjangan tangan dari Pemerintah, idealnya stok Bulog adalah 3 juta ton bukan 1,5 juta ton seperti sekarang ini, akan tetapi karena besarnya anggaran yang dibutuhkan maka stok Bulog hanya antara 1,2 juta ton sampai 1,5 juta ton. Akan tetapi dengan kondisi ini Bulog harus memiliki strategi terutama dalam pengadaan CBP yang sekarang tidak lagi memiliki *captive market* seperti untuk kebutuhan raskin dan bencana. Untuk memiliki stok sebesar 3 juta ton maka Bulog harus menyediakan anggaran sebesar Rp21 triliun, tentu ini merupakan sebuah anggaran sangat besar bagi Bulog yang sekarang statusnya sudah menjadi Perum. Stok Bulog idealnya juga tidak semuanya dalam bentuk beras, akan tetapi dalam bentuk gabah yang memiliki waktu simpan yang lebih lama dibandingkan dengan beras akan tetapi untuk hal tersebut Bulog perlu membangun infrastruktur berupa silo dan gudang penyimpanan.

V. KESIMPULAN

- A. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian membantu petani di Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan pengembangan dan perluasan penanaman Padi Inpari Nutri Zinc.
- B. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengembangkan industri pedesaan berbasis coklat pada petani coklat di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membantu meremajakan tanaman coklat petani yang sudah tua, membangunkan kebun entres coklat dan membantu peralatan pengolahan coklat menjadi tepung dan pasta coklat serta memberikan pendampingan dan bimbingan dari hulu sampai hilir yang dilakukan secara terpadu.
- C. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk meningkatkan peran Taman Teknologi Pertanian sebagai tempat untuk belajar dan berekreasi bagi masyarakat dalam mempelajari dan memanfaatkan teknologi yang handal dan ramah lingkungan dalam kegiatan budi daya dan pengembangan usaha pertaniannya.
- D. Komisi IV DPR RI mengapresiasi program dan kegiatan pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang

sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, pengelola, dan Pemerintah DIY serta menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan di Provinsi DIY.

- E. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan pengelola KPH salah satunya KPH Yogyakarta sebelum melaksanakan PP Nomor 23 Tahun 2021 atas KPH yang sudah menjalankan pengelolaan hutan yang baik dan optimal. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait permasalahan tersebut serta solusi untuk KPH di seluruh Indonesia dalam Rapat Kerja.
- F. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk meningkatkan peran Bulog sebagai alat stabilisator ketersediaan pangan strategis nasional dengan melalui peningkatan perannya dalam pengadaan pangan nasional dengan mengutamakan pasokan dan produksi dari dalam negeri.
- G. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan revitalisasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikerto agar bisa beroperasi dan menjadi salah satu pusat perekonomian terpadu di daerah selatan Pulau Jawa.
- H. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersinergi untuk menyusun rencana pengelolaan dan pembagian kewenangan dalam rangka revitalisasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikerto.
- I. Komisi IV DPR RI mengapresiasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove di Daerah Istimewa Yogyakarta. Komisi IV DPR RI mendorong program RHL dan PEN Mangrove dilaksanakan di daerah-daerah lain yang membutuhkan.
- J. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan, khususnya RHL dan PEN Mangrove, dengan terus melakukan langkah proaktif dan antisipatif atas kendala yang

terjadi di lapangan, dalam rangka meningkatkan kinerja berupa penyelesaian kegiatan/program sesuai tata waktu yang telah direncanakan.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 15 April 2021

Ketua Tim,

Ttd.

G. Budisatrio Djiwandono

A-127

LAMPIRAN DOKUMENTASI





Gambar Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI
Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021
ke Daerah Istimewa Yogyakarta

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

1. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/397083/komisi-iv-dpr-kementan-panen-padi-varietas-inpari-di-kulon-progo>
2. <https://yogya.inews.id/berita/kulonprogo-sukses-kembangkan-padi-untuk-penanganan-stunting-di-sawah-cetak-lahan-baru>
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32606/t/javascript;>
4. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32652/t/Komisi+IV+Dorong+Sinergi+Untuk+Optimalkan+Pelabuhan+Tanjung+Adikarto>
5. <https://dlhk.jogjaprov.go.id/kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-ke-pabrik-minyak-kayu-putih-sendang-mole-gunung-kidul>
6. <https://dpkp.jogjaprov.go.id/baca/Kunjungan+Kerja+Komisi+IV+DPR+RI+di+Taman+Teknologi+Pertanian+Kawasan+Ecowisata+Embung+Nglanggeran+Gunungkidul/120421/2c00d49ab72e95b48af10a9099d2c4ddd2c14bfe3d5bd86465383c0003609d97297>